

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



DINAS PERTANIAN KAB.LUWU

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah S.W.T atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

RENJA Dinas Pertanian Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2025 berpijak pada usulan masyarakat yang masuk melalui musrenbang, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, maupun isu-isu strategis yang berkembang saat ini yang sangat mendesak untuk dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian RENJA ini dibuat, yang kami sadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga membutuhkan perbaikan-perbaikan yang bersifat konstruktif, demi untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RENJA ini, semoga Allah S.W.T senantiasa meridhoi kita semua.

Belopa, Juli 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu,

Drh. JUMARDIN

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19740207 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Dinas Pertanian Kab. Luwu	9
III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH ...	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KAB. LUWU	40
V. PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Kab. Luwu Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu	18
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu	23
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu	29
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu	36
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Tahun 2025	41

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan dan Rencana kerja Kementerian Pertanian Tahun 2025.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian, sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. RPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja (Renja) ini sepatutnya dijadikan acuan dan arahan bagi seluruh Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor pertanian tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang HASil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu; dan
16. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

1. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembagunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu menjadi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2025.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

b. Tujuan

1. Untuk memberikan arah dan tuntunan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Memberikan penegasan tentang peranan penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi kerakyatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Rencana Kerja dan Pagu indikatif Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun anggaran 2023 yang lalu, tetap memprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi pertanian strategis pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang ditunjang oleh pembangunan prasarana dan sarana pertanian dan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Lapangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4. Penyediaan Bahan/Material
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

C. Penyediaan benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

1. Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

A. Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya

B. Pembangunan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian lainnya

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

A. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

V. Program Penyuluhan Pertanian

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra perangkat daerah tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Luwu**

OPD : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				
					Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8,00		9		10		11	
3	Urusan Pemerintahan lainnya		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							43.258.139.385		42.061.615.543				38.175.014.554				
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	78.043.000.986	95	29.877.361.340	100	17.994.159.942	100	17.767.432.750	100	99	100	19.749.948.405	100	67.268.213.195	100	16.817.053.299
3.27.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	132.779.400	100	32.982.900	100	17.613.600	100	13.023.600	100	74	100	17.909.632	100	63.916.132	100	15.979.033
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	9	28.760.000	6	6.660.000	2	2.455.000	2	2.365.000	100	96	2	9.962.533	10	18.987.533	3	4.746.883
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	16.549.800	2	3.624.800	1	2.818.200	1	2.728.200	100	97			3	6.353.000	1	1.588.250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	16.305.000	2	7.105.000	1	2.818.200	1	668.200	100	24	1	2.649.033	4	10.422.233	1	2.605.558
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	24.605.000	2	5.065.200	1	2.818.200	1	668.200	100	24	1	2.649.033	4	8.382.433	1	2.095.608
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	22.625.200	2	6.285.400	1	2.818.200	1	2.728.200	100	97	1	2.649.033	4	11.662.633	1	2.915.658
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4	23.934.400	2	4.242.500	1	3.885.800	1	3.865.800	100	99			3	8.108.300	1	2.027.075
3.27.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	16	66.654.955.143	8	28.302.267.733	8	17.218.155.952	7	17.058.283.002	87,50	99	4	19.024.648.791	4	64.385.199.526	100	16.096.299.882
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai kebutuhan	48	65.840.856.143	24	28.099.666.933	12	16.981.120.352	12	16.832.047.402	100	99	12	18.802.586.314	48	63.734.300.649	12	15.933.575.162
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Bulan penyediaan honorarium pengelola keuangan sesuai ketentuan	48	750.000.000	24	197.700.000	12	230.580.000	12	220.580.000	100	96	12	209.920.000	48	628.200.000	12	157.050.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	11.506.800		-		-		-		-		-				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	72	52.592.200	7	4.900.800	18	6.455.600	18	5.655.600	100	88	18	12.142.477	43	22.698.877	11	5.674.719
3.27.01.2.03	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu	100	1.110.825.000	100	69.386.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	1.250.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	866	430.200.000		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	36	320.625.000	2	69.386.000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	15	120.000.000		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundane-Undanan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	30	240.000.000		-	-	-		-		1	5.000.000	1	5.000.000	0,25	1.250.000	

3.27.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100	2.312.300.700	100	629.853.243	100	308.455.080	100	297.935.002	100	97	100	329.426.419	100	1.252.317.864	100	313.079.466
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	257.374.400	8	58.190.000	8	-	-	-			1	12.500.000	9	70.690.000	2,25	17.672.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	15	77.422.000	4	12.575.750	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100	1	4.360.400	6	17.936.150	1,50	4.484.038
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	36.056.300	10	16.054.200	5	7.201.000	5	7.201.000	100	100	5	6.444.000	20	29.699.200	5,00	7.424.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	75	100.800.000	34	32.960.000	15	21.600.000	15	21.600.000	100	100	15	18.000.000	64	72.560.000	16,00	18.140.000
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	64	135.614.000	32	67.410.300	3	35.183.080	3	35.183.080	100	100	16	33.630.519	51	136.223.899	12,75	34.055.975
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	8	86.750.000	7	13.419.400	4	12.500.000	4	8.250.000	100	66		-	11	21.669.400	2,75	5.417.350
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah	48	1.587.684.000	299	424.346.793	12	230.971.000	12	224.700.922	100	97	12	254.491.500	323	903.539.215	80,75	225.884.804
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	30.600.000	1	4.896.800							-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.808.417.581	100	642.200.980	100	251.610.000	100	229.938.600	100	91	100	213.799.363	100	1.074.088.943	100	268.522.236
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	6.800	99.555.000	2.929	11.850.000	1.700	-		-								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan biaya tagihan telepon, air dan Listrik	48	327.521.181	24	132.890.480	12	68.010.000	12	66.638.600	100	98	12	46.999.363	48	246.528.443	12,00	61.632.111
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	1.308	1.381.341.400	547	497.460.500	12	183.600.000	12	163.300.000	100	89	240	166.800.000	799	827.560.500	199,75	206.890.125
3.27.01.2.09	- Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100	4.904.545.000			-	-					-	-	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	45	1.525.140.000			-	-					-	-	-	-	-	
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	24	66.325.000			-	-					-	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8	3.313.080.000			-	-					-	-	-	-	-	
3.27.01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	1.119.178.162	100	200.670.484	100	198.325.310	53	168.252.546	53	85	100	159.164.200	100	487.690.730	100	121.922.683
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	581	632.022.940	114	160.273.984	89	91.798.150	89	62.432.546	100	68	89	104.269.200	292	326.975.730	73,00	81.743.933
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah luas aset tetap yang dipelihara	50	356.587.200			-	-					-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3.600	86.888.022	600	40.396.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	81	43.680.000			12	106.527.160	12	105.820.000	100	99	12	54.895.000	24	160.715.000	6,00	40.178.750
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan	3	15.324.906.996	10	4.676.240.131	3	10.377.736.000		10.165.254.700		98	3,00	2.243.379.000		16.275.844.571		4.068.961.143
		Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura	3															
		Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	3															
3.27.02.2.01	- Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4	4.188.100.600	2	3.823.089.300	1	9.922.921.000	1	9.772.939.200	100	98	1	362.834.500		13.246.108.000	-	3.311.527.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	60	3.475.345.600	24	3.110.334.300	12	9.922.921.000	12	9.772.939.200	100	98	12	362.834.500	48	13.246.108.000	12,00	3.311.527.000
	Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan didampingi penggunaannya	3	712.755.000	23	712.755.000	23	-	-	-	-		23	-		-	-	

3.27.02.2.02	- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	15	4.835.403.996	15	604.475.831	15	454.815.000	10	392.315.500	67	86	15	1.491.794.500	15	2.392.311.571	100	598.077.893
	Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luasan Areal Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	20	321.001.000	5	96.274.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	76	4.514.402.996	20	508.201.571	1	454.815.000	1	392.315.500	100	86	15	1.491.794.500	36	2.392.311.571	9,00	598.077.893
3.27.02.2.03	- Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis pengawasan mutu produk peternakan yang dilaksanakan	2	73.201.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	36.600.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Laporan pelaksanaan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	1	36.600.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.04	- Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Penceger	Jumlah Pengawasan Obat Hewan	12	36.600.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3	36.600.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.05	- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah kabupaten	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah kabupaten	12	36.600.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	3	36.600.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.06	- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	31.650	6.155.000.000	5	248.675.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	388.750.000	-	637.425.000	-	159.356.250
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	31.650	6.075.000.000	10	248.675.000	-	-	-	-	-	-	221	388.750.000	231	637.425.000	57,75	159.356.250
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diadakan	3	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan	3	72.488.211.760	10	14.386.616.265	3	5.709.145.780	-	5.390.696.457	-	99	3,00	12.933.050.750	3,00	27.535.688.947	-	6.883.922.237
		Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
		Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
3.27.03.2.01	- Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyelenggaraan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	1.141.769.200	1	192.161.540	1	296.345.780	1	223.460.280	100	75	1	14.514.750	1	430.136.570	100	107.534.143
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen yang disusun	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	12	847.889.400	1	192.161.540	12	296.345.780	1	223.460.280	8	75	12	14.514.750	14	430.136.570	3,50	107.534.143
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Actionplan yang disusun	1	143.879.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.27.03.2.02	-	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun / Direhab	408	70.371.633.100	41	14.140.756.050	41	5.412.800.000	57	5.167.236.177	139	95	41	12.918.536.000	27.105.552.377	-	6.776.388.094
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	122	24.113.930.800	32	5.756.343.350	14	605.000.000	14	594.418.400	100	98	20	3.422.442.300	9.773.204.050	16,50	2.443.301.013
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	74	9.361.423.100	18	2.169.783.550	2	300.000.000	2	273.007.000	100	91	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	48	9.765.949.400	23	3.001.439.850	28	3.285.300.000	28	3.155.197.500	100	96	10	9.055.515.500	15.212.152.850	15,25	3.803.038.213
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	64	7.763.030.000	4	483.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun	30	3.819.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	67	2.434.520.000	9	375.781.300	2	94.500.000	2	93.900.000	100	99	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun dan dipelihara	6	1.367.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab, dibangun dan dipeliharanya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab, dibangun dan dipeliharanya	22	6.177.000.000	3	1.724.954.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Jenis Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun / dipelihara	19	5.569.064.800	5	628.904.000	4	1.128.000.000	4	1.050.713.277	100	93	2	440.578.200	2.120.195.477	2,75	530.048.869
3.27.03.2.03	-	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten	Luas Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten	5	974.809.460	2	53.698.675	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Luas Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	5	974.809.460	2	53.698.675	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3.27.04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Populasi Ternak	3	1.303.122.054	0	73.613.700	3	35.330.000	-	32.162.636	-	91	3	14.681.040	97.917.276	100	24.479.319
3.27.04.2.01	-	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Bulan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	48	504.633.654	12	51.073.600	12	35.330.000	12	32.162.636	100	91	12	14.681.040	97.917.276	100	24.479.319
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan Hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	48	504.633.654	2	51.073.600	12	35.330.000	12	32.162.636	100	91	12	14.681.040	97.917.276	6,50	24.479.319
3.27.04.2.02	-	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten	Jumlah Bulan penyelenggaraan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten	36	223.357.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/kota	Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten	12	223.357.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.03	-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Jenis penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	3	212.574.000	-	22.540.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani	150	212.574.000	9	22.540.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.04	-	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Jumlah Bulan penyelenggaraan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	36	362.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	362.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	1.250.114.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.05.01	-	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	36	1.250.114.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan pelaksanaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	362.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan Penanggulangan pasca bencana bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kesehatan Hewan	12	887.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha bidang pertanian yang diawasi Perizinannya	200	62.557.200			-	-				-	-					
3.27.06.01	- Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah pengawasan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan/diawasi	200	62.557.200			-	-				-	-					
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3	62.557.200			-	-				-	-					
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	PDRB Sektor Petanian	53	22.356.089.410	53,21	10.337.239.890	53	9.141.767.663		8.706.069.000	-	95	53	3.233.955.359	53	21.997.864.249	100	5.499.466.062
3.27.07.01	- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	100	22.356.089.410	100	10.337.239.890	100	9.141.767.663	100	8.706.069.000	100	95	100	3.233.955.359	100	21.997.864.249	100	5.499.466.062
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	22	902.000.000	227	156.200.000	227	253.000.000	227	123.200.000	100	49						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan di Kecamatan dan Desa	125	14.347.711.410	125	7.974.977.448	125	3.179.609.400	125	2.975.765.162	100	94	125	2.361.700.643	375	13.312.443.253	93,75	3.328.110.813
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian	22	5.115.878.000	22	2.206.062.442	22	5.709.158.263	22	5.607.103.838	100	98	22	872.254.716	66	8.685.420.996	16,50	2.171.355.249
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	60	190.500.000			-	-				-	-					
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan	180	1.800.000.000			-	-				-	-					

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 43,258,139,385** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 42,061,615,543** atau sebesar **97.23 %**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Sejumlah kebijakan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan khususnya di bidang Pertanian.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025		2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	77,50	80,00	-	81,47	81,50	-	-
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	-	BB	B	-	-
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis		Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya per hektar (ton)	5,10	5,13	5,15	-	5,49	5,59	-	-
			Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	52,91	53,17	53,44	-	52,49	52,54	-	-

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, terkait Pelayanan Kesehatan Hewan, dari target nilai IKP 77,5 diperoleh realisasi 81,47 dengan pencapaian sebesar 105,12%. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup puas dengan pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu pada tahun 2023. Hal ini akan terus ditingkatkan ditahun-tahun kedepan, utamanya terkait pelayanan langsung ke masyarakat.
- II. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Dari target nilai SAKIP “BB”, berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian Kab. Luwu untuk tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Luwu nomor : 700/134/Itda/KHS/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, Dinas Pertanian memperoleh skor 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) dengan kategori penilaian Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Pelaporan terkait akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Hal ini akan dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan lagi kedepannya.
- III. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan target kinerja produktivitas padi atau bahan pangan lokal lainnya per hektar (ton), dari target 5,13 ton per hektar, diperoleh hasil sebesar 5,49 ton per hektar, atau mencapai sebesar 108,93 %, dan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dari target 53,17 % mencapai 52,49% dengan pencapaian 98,72%. Walaupun mengalami sedikit penurunan namun hal ini menunjukkan sektor pertanian mampu menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian daerah.

Berdasarkan indikator kinerja yang terasaji dalam tabel 2.2, menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan, realisasi yang diperoleh sudah berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Kemampuan pencapaian produksi pertanian realistis dan dapat dicapai, oleh karena itu target kinerja yang diproyeksikan dapat lebih ditingkatkan lagi.
- Ada beberapa program yang dapat mendukung pencapaian target kinerja optimal yang didukung oleh ketersediaan anggaran, baik melalui APBD maupun bantuan pemerintah provinsi dan pusat..

Kebijakan yang perlu diambil terkait perencanaan dan penganggaran untuk dapat memaksimalkan realisasi capaian fisik dan keuangan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Penganggaran berbasis “money follows program” wajib diterapkan dalam system perencanaan pembangunan daerah, sehingga peaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah.
2. Target kinerja dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan sehingga menjadi lebih realistis dan terukur.
3. Melakukan efisiensi anggaran dengan mengutamakan kegiatan yang mendukung capaian utama Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Kabupaten Luwu

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, antara lain :

1. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana lahan dan air yang dirasakan belum memadai secara maksimal.
2. Pemanfaatan lahan pertanian yang belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih unggul untuk usaha pertaniannya.
4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
5. Belum maksimalnya penggunaan alat dan mesin pertanian.
6. Belum padunya kebijakan antar sektoral.
7. Ancaman penyakit menular ternak yang sesekali muncul.
8. SDM dan kelembagaan peternak belum berkembang dengan baik.
9. Sarana penunjang pengembangan perbibitan ternak yang masih sangat terbatas.
10. Kesadaran peternak untuk menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) masih sangat kurang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah serta dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu padi, palawija, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, petani, dan petugas.
3. Menciptakan program pembangunan pertanian dan peternakan yang aspiratif, inovatif, responsive, terpadu dan sustainable.
4. Membuka peluang sumber pendapatan lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan mutu hasil pertanian dan peternakan.
6. Menghasilkan produk pertanian dan peternakan yang sehat dan ramah lingkungan dengan nilai jual yang tinggi.
7. Memanfaatkan potensi sumber daya lahan dan air pertanian dan peternakan secara optimal.
8. Menciptakan peluang yang lebih luas pengembangan agribisnis dan usaha tani.
9. Meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan hewan dan pemeliharaan ternak yang baik dan sehat.

Sedangkan sasaran dari tujuan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan distribusi pangan yang cukup, aman dan terjangkau.
2. Penerapan teknologi usaha tani, melalui penggunaan alsintan secara berkelompok.
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian strategis.
4. Peningkatan prasarana dan sarana pertanian.
5. Peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
6. Peningkatan jumlah populasi ternak.
7. Meningkatkan kualitas dan kinerja Penyuluh Pertanian.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Dinas Pertanian Kab. Luwu.

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG URUSAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG URUSAN	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	19.221.311.223	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	19.221.311.223	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	19.183.320	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	19.183.320	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.255.780	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.255.780	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.525.100	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.525.100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.641.160	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.641.160	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.966.840	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.966.840	

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100	Persen	18.438.867.567	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100	Persen	18.438.867.567	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Belopa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2208	OB	18.209.771.887	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Belopa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2208	OB	18.209.771.887	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	220.080.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	220.080.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	9.015.680	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	9.015.680	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	446.913.978	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	446.913.978	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	76.694.100	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	76.694.100	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.281.838	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.281.838	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	6.627.411	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	6.627.411	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	
5	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	39.999.638	5	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	39.999.638	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	-	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	-	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	294.310.991	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	294.310.991	

D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	202.999.858	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	202.999.858	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.999.858	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.999.858	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153.000.000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153.000.000	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	65	Persen	113.346.500	G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	90	Persen	113.346.500	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Belopa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	Unit	107.856.500	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Belopa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	Unit	107.856.500	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	jenis	5.490.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	13	jenis	5.490.000	
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi peternakan Persentase peningkatan produksi perkebunan Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persentase peningkatan produksi hortikultura	11,80 2,34 2,50 4,12	Persen Persen Persen Persen	11.467.205.465	II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi peternakan Persentase peningkatan produksi perkebunan Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persentase peningkatan produksi hortikultura	3,00	Persen	11.467.205.465	
A	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	91.07	Persen	6.199.620.000	A	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik			6.199.620.000	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kec. Belopa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan	6.199.620.000	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kec. Belopa	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan	6.199.620.000	
B	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	24	Hektar	4.077.655.465	B	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	24	Hektar	4.077.655.465	
1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kec. Ponrang	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12	Dokumen	4.077.655.465	1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kec. Ponrang	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12	Dokumen	4.077.655.465	
C	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	7	Jenis	1.189.930.000	C	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	7	Jenis	1.189.930.000	
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Belopa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	119	ekor	1.189.930.000	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Belopa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	119	ekor	1.189.930.000	

III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik	0,25	Persen	11.839.093.940	III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	3,00	Persen	11.839.093.940	
A	Pengembangan Prasarana Pertanian		Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	Jenis	439.989.000	A	Pengembangan Prasarana Pertanian		Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	Jenis	439.989.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12	Laporan	439.989.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12	Laporan	439.989.000	
B	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	98	unit	11.399.104.940	B	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	98	unit	11.399.104.940	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	35	unit	6.499.585.320	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	35	unit	6.499.585.320	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	Unit	3.999.877.220	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	Unit	3.999.877.220	
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air yang dibangun	10	unit	539.750.000	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air yang dibangun	10	unit	539.750.000	
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	359.892.400	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	359.892.400	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	11	Persen	10.712.500	IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100,00	Persen	10.712.500	
A	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12	Bulan	10.712.500	A	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12	Bulan	10.712.500	
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Laporan	10.712.500	1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	laporan	10.712.500	

V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	100,00	Persen	938.458.480	VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	100,00	Persen	938.458.480	
A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	227	desa/kelur ahan	938.458.480	A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	227	desa/kelur ahan	938.458.480	
1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22	Unit	99.868.000	1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22	Unit	99.868.000	
2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22	Unit	838.590.480	2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22	Unit	838.590.480	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pembangunan pertanian yang terangkum dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini juga menampung usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, pokok-pokok pikiran dan hasil reses anggota DPRD Kab. Luwu. Selain itu masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan usulan kegiatan secara langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Luwu melalui Proposal kegiatan.

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat relevan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu termasuk prioritas program dan kegiatan yang direncanakan. Namun usulan dari masyarakat masih banyak yang kurang lengkap informasi mengenai volume/besaran, usulan biaya, sasaran lokasi sehingga memerlukan tahapan verifikasi langsung ke lapangan dalam bentuk kegiatan penetapan Calon Petani – Calon Lokasi (CP-CL).

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Kab. Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
I.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Luwu	Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Luwu	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya	514 unit	Aspirasi / Pokok pikiiran DPRD dan Usulan Masyarakat
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota		
	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Kab. Luwu	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	100 Ha	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
3.	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Luwu	Jumlah benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dsediakan		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Kab. Luwu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	10.160 ekor	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PRASARANA PERTANIAN		PENGEMBANGAN		
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	35 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	10 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	20 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	2 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD

Besarnya volume dan anggaran yang diusulkan baik oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan menjadi kendala dalam pemenuhannya. Hal ini menyebabkan usulan-usulan yang telah disampaikan, tidak semuanya dapat dipenuhi. Dalam mengakomodir usulan-usulan pemangku kepentingan tersebut hal-hal yang menjadi pertimbangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pengembangan komoditas.
2. Ketersediaan anggaran pembangunan
3. Pemerataan sebaran pembangunan
4. Kesiapan SDM dan infrastruktur
5. Konsepsi kebijakan teknis dan keberlanjutan program
6. Kelengkapan administrasi usulan yang disampaikan yang terkait pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan nantinya.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Strategi Pembangunan Pertanian Nasional yang digiatkan oleh pemerintah pusat meliputi :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio energi dengan pendekatan kawasan.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian.
3. Penyediaan prasarana dasar bidang pertanian.
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan kebijakan pembangunan pertanian nasional adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi.
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di pedesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya).
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.
7. Kebijakan system perbenihan/perbibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, kebijakan system perkarantinaaan pertanian.

8. Kebijakan mendukung program tematik : MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, Ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan.
9. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam.
10. Kebijakan subsidi : (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikkan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.
11. Kebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja dan menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka kredit mekanisasi pertanian sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Renja tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu ini disusun berdasarkan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian nasional, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 diharapkan tidak lepas dari program pembangunan pertanian nasional, sehingga ada sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Tujuan daripada Rencana Kerja pertanian di Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Menyediakan dan Mengembangkan Sarana Pertanian
3. Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian
4. Melaksanakan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian

Adapun sasaran yang diinginkan dalam pembangunan pertanian adalah sebagai berikut.

1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Tersedianya Sarana Pertanian.
3. Tersedianya Prasarana Pertanian.
4. Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Terlaksananya Penyuluhan Pertanian.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota
 - c. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2025, disampaikan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pembangunan tahun 2025 Dinas Pertanian disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
3				SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN							
3	27			SEMUA BIDANG URUSAN				43.476.781.608			40.132.250.070
3	27	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		100 Persen	19.221.311.223	100 Persen		19.647.250.070
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu		100 persen	19.183.320	100 persen		31.305.000
3	27	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	4.255.780	2 Dokumen		7.890.000
3	27	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3.525.100	1 Dokumen		-
3	27	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.641.160	1 Dokumen		5.305.000
3	27	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2.897.220	1 Dokumen		5.305.000
3	27	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.897.220	1 Dokumen		5.305.000
3	27	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	2.966.840	1 Dokumen		7.500.000
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun		8 Jenis	18.438.867.567	8 Jenis		18.912.495.070
3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.208 OB	18.209.771.887	2.340 OB		18.652.789.870
3	27	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	220.080.000	12 Dokumen		251.880.000
3	27	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	9.015.680	18 Laporan		7.825.200

3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah		100	Persen	446.913.978	100	Persen	382.950.000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	76.694.100	1	Jenis	7.700.000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.281.838	1	Jenis	1.000.000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	6.627.411	5	Jenis	6.500.000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	15	Dokumen	18.000.000
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	39.999.638	16	Jenis	44.000.000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12	Laporan	5.750.000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	294.310.991	12	Laporan	300.000.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah			202.999.858			216.800.000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.999.858	12	Bulan	50.000.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153.000.000	12	Laporan	166.800.000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	89	Unit	113.346.500	89	Unit	103.700.000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	Unit	107.856.500	174	Unit	98.700.000
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	5.490.000	13	unit	5.000.000

3	27	02			PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi peternakan Persentase peningkatan produksi perkebunan Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persentase peningkatan produksi hortikultura	11,80 Persen 2,34 Persen 2,50 Persen 4,12 Persen	11.467.205.465	9,21 Persen 10 Persen 11,89 Persen 10,76 Persen	8.500.000.000
3	27	02	2.01		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	12 Laporan	6.199.620.000	12 Laporan	5.000.000.000
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	6.199.620.000	12 Laporan	5.000.000.000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	24 Hektar	4.077.655.465	24 Hektar	2.500.000.000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	4.077.655.465	12 Dokumen	2.500.000.000
3	27	02	2.06		Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	7 Jenis	1.189.930.000	7 Jenis	1.000.000.000
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	119 ekor	1.189.930.000	10.550 ekor	1.000.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik	0,25 Persen	11.839.093.940	3,00 Persen	10.800.000.000
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	3 Jenis	439.989.000	3 Jenis	350.000.000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	439.989.000	12 Laporan	350.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	98 unit	11.399.104.940	98 unit	10.450.000.000
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	35 Unit	6.499.585.320	32 Unit	5.750.000.000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Usaha Tani	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Unit		5 Unit	300.000.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	20 Unit	3.999.877.220	21 Unit	4.000.000.000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	10 Unit	539.750.000	6 Unit	200.000.000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	2 Unit	359.892.400	3 Unit	200.000.000

3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		11,00	Persen	10.712.500	5,00	Persen	35.000.000
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten		12	Bulan	10.712.500	12	Laporan	35.000.000
3	27	04	2.01	01 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		12	Laporan	10.712.500	12	Laporan	35.000.000
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian		100,00	Persen	938.458.480	100,00	Persen	1.150.000.000
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian		227	desa/kelurahan	938.458.480	227	desa/kelurahan	1.150.000.000
3	27	07	2.01	02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		22	Unit	99.868.000	22	Unit	200.000.000
3	27	07	2.01	03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		22	Unit	838.590.480	22	Unit	950.000.000

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KAB. LUWU

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian akan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Tahun 2025

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025			SUMBER DANA
								TARGET	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
3					SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN						
3	27				SEMUA BIDANG URUSAN					43.476.781.608	
3	27	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persen	100		19.221.311.223	DAU/SILPA/ PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	persen	100		19.183.320	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		4.255.780	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	6	54.280	325.680	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	60	30.000	1.800.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	20	35.000	700.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	40	30.000	1.200.000	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		3.525.100	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	54.280	217.120	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	60	30.000	1.800.000	
					Ball point		OJ	2	38.940	77.880	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	40	30.000	1.200.000	

3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		2.641.160	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	63.720	191.160	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		2.897.220	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	54.280	217.120	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		2.897.220	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	54.280	217.120	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	

3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		2.966.840	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	63.720	191.160	
					Tinta Printer Epson		Botol	6	54.280	325.680	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis	4		18.438.867.567	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	2.208		18.209.771.887	
					Belanja Gaji Pokok PNS		Tahun	1	8.855.601.420	8.855.601.420	
					Belanja Gaji Pokok PPPK		Tahun	1	1.585.138.200	1.585.138.200	
					Belanja Tunjangan Keluarga ASN		Tahun	1	865.972.323	865.972.323	
					Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		Tahun	1	134.815.716	134.815.716	
					Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Tahun	1	163.000.000	163.000.000	
					Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Tahun	1	1.569.540.000	1.569.540.000	
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Tahun	1	42.000.000	42.000.000	
					Belanja Tunjangan Beras PNS		Tahun	1	508.431.417	508.431.417	
					Belanja Tunjangan Beras PPPK		Tahun	1	103.995.120	103.995.120	
					Belanja Pembulatan Gaji PNS		Tahun	1	109.292	109.292	
					Belanja Pembulatan Gaji PPPTK		Tahun	1	26.722	26.722	
					Belanja iuran jaminan kesehatan PNS		Tahun	1	562.628.072	562.628.072	
					Belanja iuran jaminan kesehatan PPPTK		Tahun	1	72.611.411	72.611.411	
					Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS		Tahun	1	18.244.721	18.244.721	
					Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPTK		Tahun	1	3.804.345	3.804.345	
					Belanja iuran jaminan kematian PNS		Tahun	1	54.734.162	54.734.162	
					Belanja iuran jaminan kematian PPPTK		Tahun	1	10.699.245	10.699.245	
					Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		Tahun	1	30.657.323	30.657.323	
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		Tahun	1	3.627.762.398	3.627.762.398	

3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		220.080.000	
					Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran		12 OB	12	1.090.000	13.080.000	
					Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan		12 OB	12	340.000	4.080.000	
					Belanja Honorarium Bendahara Penngeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu / Staf Pengelola Keuangan		24 OB	36	640.000	23.040.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		84 OB	72	1.010.000	72.720.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		12 OB	12	1.250.000	15.000.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PA/KPA		12 OB	12	2.590.000	31.080.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu 2,5 M s.d 5 M)		12 OB	12	2.210.000	26.520.000	
					Belanja Honorarium Pengurus Barang		12 OB	12	700.000	8.400.000	
					Belanja Honorarium User SIPD SKPD		12 OB	12	1.000.000	12.000.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan		12 OB	12	680.000	8.160.000	
					Belanja Honorarium User Sirup		12 OB	12	500.000	6.000.000	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	18		9.015.680	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/Kotak	150	30.000	4.500.000	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	5	63.720	318.600	
					Tinta Printer Epson Hitam		botol	5	54.280	271.400	
					Tinta Printer Epson Warna		botol	6	54.280	325.680	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	90	30.000	2.700.000	
					Uang Lembur Gol. I		OJ	50	18.000	900.000	

3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100		446.913.978	
3	27	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2		76.694.100	
				Laptop		unit	1	19.700.100	19.700.100	
				Printer		unit	20	2.849.700	56.994.000	
3	27	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		11.281.838	
				Air Mineral Kemasan Botol, 330 mL		botol	576	3.097	1.783.872	
				Air Mineral Kemasan Gelas 220 mL - 240 mL		Dos	120	66.658	7.998.960	
				Kopi Saset Uk. 20 Gram Isi: 10 Pcs		Pak	24	25.610	614.640	
				Teh Celup Isi: 20 - 25 Pcs		Kotak	12	9.168	110.016	
				Materai		Lembar	50	15.487	774.350	
3	27	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3		6.627.411	
				Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho		meter	40	61.360	2.454.400	
				Foto kopi		lembar	8.047	413	3.323.411	
				Jilid Dokumen Sampai 100 Halaman		Exampler	40	21.240	849.600	
3	27	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12		18.000.000	
				Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Media Lokal		Exemplar	180	100.000	18.000.000	
3	27	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	30		39.999.638	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
				Bolpoin Isi 12 Pcs, Gel		Lusin	20	38.940	778.800	
				Bolpoin Isi 12 Pcs, non Gel		Lusin	20	40.120	802.400	
				Spidol Besar Permanen		Buah	10	8.968	89.680	
				Tinta Stempel Uk. 50 Ml, Hitam		Botol	2	8.260	16.520	

				Penjepit Kertas No. 111, Isi 12 Pcs	Pack	10	6.372	63.720	
				Penjepit Kertas No. 200, Isi 12 Pcs	Pack	10	15.340	153.400	
				Penjepit Kertas No. 260, Isi 12 Pcs	Pack	20	22.656	453.120	
				Penjepit Kertas No. 300, Isi 6 Pcs	Pack	10	70.800	708.000	
				Klip Kertas No. 05, Isi 100 Pcs	Pack	24	8.260	198.240	
				Buku Folio Uk. 21 Cm x 31,5 Cm, Isi 200 Lembar	Buah	10	40.816	408.160	
				Ordner Karton Uk. F4 / Folio	Buah	30	22.892	686.760	
				Map Batik Uk. F4 / Folio, Bahan Karton Tebal No.30	Buah	50	18.762	938.100	
				Map Kertas Uk. F4 / Folio, Isi 50 Pcs	Pack	10	38.350	383.500	
				Map Kertas Uk. F4 / Folio, Isi 50 Pcs	Pack	10	38.350	383.500	
				Map Plastik Kancing Uk. F4 / Folio, Isi 12 Pcs	Pack	10	38.940	389.400	
				Lem kertas Uk. 500 Gram	Buah	7	29.500	206.500	
				Staples Kecil No. 10	Buah	7	20.060	140.420	
				Isi Staples Kecil No.10, Isi: 20 Box	Pack	5	36.580	182.900	
				Pelubang Kertas Uk. Besar	Buah	7	69.856	488.992	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jenis			-	
				Kertas HVS A4 Uk. 75 Gsm	Rim	20	63.720	1.274.400	
				Kertas HVS F4 Uk. 75 Gsm	Rim	300	76.700	23.010.000	
				Kertas NCR Uk. F4, Warna Putih	Rim	5	81.420	407.100	
				Kertas NCR Uk. F4, Warna Pink	Rim	5	76.700	383.500	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	jenis			-	
				Tinta Printer Hitam Uk. 100 mL	Botol	30	54.280	1.628.400	
				Tinta Printer Warna Uk. 100 mL	Botol	30	54.280	1.628.400	
				Cartridge Printer Hitam	Unit	6	341.020	2.046.120	
				Cartridge Printer Warna	Buah	3	364.620	1.093.860	
				Flashdisk Kap. 16 GB	Buah	2	66.198	132.396	
				Flashdisk Kap. 64 GB	Unit	2	89.680	179.360	
				Mouse Nirkabel Silent Click	Buah	5	148.798	743.990	

3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		294.310.991	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						
					BBM Pertamina Sulawesi Selatan		Liter	150	16.726	2.508.900	
					BBM Dexlite Sulawesi Selatan		Liter	151	18.461	2.787.611	
					Uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota lebih dari 8 jam		OH	200	170.000	34.000.000	
					Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam; Pejabat Eselon II		OH	20	75.000	1.500.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa					-	
					Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Sulawesi Selatan		OH	40	430.000	17.200.000	
					Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota D.K.I. Jakarta		OH	30	530.000	15.900.000	
					Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Pejabat Eselon II		OH	27	150.000	4.050.000	
					BBM Pertamina Sulawesi Selatan		Liter	100	16.726	1.672.600	
					BBM Dexlite Sulawesi Selatan		Liter	80	18.461	1.476.880	
					Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi Jakarta - Makassar		OK	25	3.829.000	95.725.000	
					Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yana Sama (One Way) Makassar - Kab. Luwu		Kali	48	350.000	16.800.000	
					Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Jakarta - Kota Tangerang		OK	20	286.000	5.720.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II D.K.I. Jakarta		OK	10	2.063.000	20.630.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Sulawesi Selatan		OK	10	1.938.000	19.380.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV D.K.I. Jakarta		OK	15	992.000	14.880.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Sulawesi Selatan		OK	10	1.423.000	14.230.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I D.K.I. Jakarta		OK	15	730.000	10.950.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I Sulawesi Selatan		OK	20	745.000	14.900.000	

3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan	Jenis	1		-	
3	27	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	-		-	
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100		202.999.858	
3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		49.999.858	
				Biaya Beban Listrik P2 Kap. di atas 200 kVA		Kwh	19.018	1.381	26.263.858	
				Jaringan Internet; Internet 90 Mbps		Tahun	1	18.000.000	18.000.000	
				Tarif Internet dan TV Kap. 30 Mbps		Bulan	12	478.000	5.736.000	
3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		153.000.000	
				Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran		OB	93	1.000.000	93.000.000	
				Operator Komputer		OB	24	1.000.000	24.000.000	
				Jasa Tenaga Kebersihan; Perkantoran		OB	12	500.000	6.000.000	
				Staf Kantor Penjaga Malam		OB	12	1.500.000	18.000.000	
				Supir; Kepala Dinas		OB	8	1.500.000	12.000.000	
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen	65		113.346.500	
3	27	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	174		107.856.500	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
				BBM Pertamina; Sulawesi Selatan		Liter	1.000	16.726	16.726.000	
				BBM Dexlite; Sulawesi Selatan		Liter	500	18.461	9.230.500	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						
				Ban Luar Roda 4 Uk.185/70R14		Buah	4	745.000	2.980.000	
				Aki Mobil N 540		Unit	2	1.020.000	2.040.000	
				Kampas Rem Cakram; Roda 4		Unit	2	350.000	700.000	

					Saringan Bahan Bakar; R4 Bensin 23100-87603-00	Pcs	10	150.000	1.500.000	
					Ban Luar; R4 750R16	Pcs	4	1.850.000	7.400.000	
					Bearing Roda Depan Dalam; Roda 4	Pcs	4	250.000	1.000.000	
					Saringan Bahan Bakar; Roda 4 Solar	Pcs	10	400.000	4.000.000	
					Shockbreaker Depan; Roda 4	Unit	2	900.000	1.800.000	
					Pemeliharaan kendaraan Roda 2					
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua; Sulawesi Selatan	Unit	1	4.910.000	4.910.000	
					Pemeliharaan kendaraan Roda 4					
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat; Sulawesi Selatan	Tahun	1	36.770.000	36.770.000	
					Pajak Kendaraan Roda 2					
					Pajak STNK Roda 2/3 Kategori B	Unit	40	200.000	8.000.000	
					Pajak Kendaraan Roda 4					
					Pajak STNK Roda 4/Lebih Kategori I	Unit	6	1.800.000	10.800.000	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	13	5.490.000	
					Pemeliharaan Sarana Kantor; AC Split		unit	9	610.000	5.490.000

3	27	02			PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	11,80		11.467.205.465	DAU / DID / RETRIBUSI JASA USAHA
						Persentase peningkatan produksi perkebunan	Persen	2,34			
						persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	2,50			
						Persentase peningkatan produksi hortikultura	Persen	4,12			
3	27	02	2.01		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	91.07		6.199.620.000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12		6.199.620.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian -Hand Traktor		unit	73	32.700.000	2.387.100.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin Pemipil Jagung		unit	25	31.000.000	775.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin Pompa Air		unit	20	26.000.000	520.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Combine Harvester		unit	2	468.000.000	936.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Power Threaser Multiguna (PTM)		unit	12	30.500.000	366.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian- Rice Milling Unit (RMU)		unit	2	384.000.000	768.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian -Mesin Perontok Cengkeh		unit	4	30.100.000	120.400.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Hand Sprayer		unit	376	870.000	327.120.000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar	24		4.077.655.465	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	12		4.077.655.465	
					Belanja Bahan-Bahan Kimia						
					Pupuk Organik, Spesifikasi : Cair			10	148.680	1.486.800	
					Pupuk Urea			500	15.487	7.743.500	
					Fungisida + ZPT, Spesifikasi : 250 EC, Uk. 80 MI			30	86.730	2.601.900	
					Herbisida, Spesifikasi : Cair			130	109.651	14.254.630	

				Insektisida			30	76.198	2.285.940	
				Insektisida Hama Wereng, Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			7	260.066	1.820.462	
				Insektisida Pembasmi Ulat dan Hama, Spesifikasi : Uk. 100 ML			10	46.462	464.620	
				Pupuk NPK, Spesifikasi : 15+15+15			500	24.780	12.390.000	
				Pupuk Organik, Spesifikasi : Cair			50	148.680	7.434.000	
				Upah Kerja Petugas IKB						
				Jasa Tenaga Administrasi Kantor,			26	1.000.000	26.000.000	
				Tanaman Pangan						
				Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Benih Padi Inbrida : Benih Pokok	Kg		10.000	14.650	146.500.000	
				Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Benih Jagung : Benih Pokok	Kg		988	125.000	123.500.000	
				Hortikultura						
				Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Bibit Durian Okulasi	Btg		12.000	67.000	804.000.000	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Alpukat	Btg		5.000	54.000	270.000.000	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Lengkeng	Btg		5.000	37.500	187.500.000	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Pisang	Btg		20.000	21.000	420.000.000	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Benih Kangkung, Spesifikasi : Uk. 1 Kg	perbungkus		179	47.082	8.427.678	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : enih Bayam Batik	perbungkus		85	60.711	5.160.435	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Cabe	perbungkus		1.300	123.900	161.070.000	
				Perkebunan						
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Pala	Btg		12.163	18.500	225.015.500	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Kakao	Btg		100.000	16.500	1.650.000.000	
3	27	02	2:06	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	Jenis	7		1.189.930.000	
3	27	02	2:06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	119		1.189.930.000	
				bibit ternak sapi		ekor			-	
				Bibit Ternak Kambing (10 betina : 1 Jantan)		ekor	66	3.500.000	231.000.000	
				Bibit Ternak Ayam		ekor	10.094	95.000	958.930.000	

3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik	Persen	0,25		11.839.093.940	DAU / DID
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jenis	3		439.989.000	
3	27	03	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12		439.989.000	
				Beban barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Bibit Sawit		Btg	26.666	16.500	439.989.000	
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Pertanian yang dibangun	unit	98		11.399.104.940	
3	27	03	2.02	01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	35		6.499.585.320	
				Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Irigasi Air Tersier		m1	4.725	1.168.500	5.520.835.320	
				Perencanaan		Paket	1	165.000.000	165.000.000	
				Pengawasan		Paket	1	110.000.000	110.000.000	
				Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Irigasi Air Tanah Dangkal (DAU)		Unit	7	100.000.000	700.000.000	
				Perencanaan		Paket	1	2.250.000	2.250.000	
				Pengawasan		Paket	1	1.500.000	1.500.000	
3	27	03	2.02	02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			-	
				Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Embung		Unit			-	
				Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket			-	
				Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket			-	
3	27	03	2.02	03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20		3.999.877.220	
				Pembangunan Jalan Usaha Tani		M2	21.045	180.916	3.807.377.220	
				Perencanaan		Paket	1	115.500.000	115.500.000	
				Pengawasan		Paket	1	77.000.000	77.000.000	
3	27	03	2.02	04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit		Unit			-	
				Pembangunan DAM Parit		Unit			-	
				Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket			-	
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket			-	

3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10		539.750.000	
					Pembangunan Pintu Air		Unit	6	85.000.000	510.000.000	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	15.750.000	15.750.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	14.000.000	14.000.000	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang direhab dan disediakan sarana pendukungnya	Unit			-	
					Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya		Paket			-	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket				
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket			-	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2		359.892.400	
					Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Cetak Sawah		M3	2.856	125.400	358.142.400	
					Perencanaan		Paket	1	1.050.000	1.050.000	
					Pengawasan		Paket	1	700.000	700.000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	11,00		10.712.500	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK / DAK
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Bulan	12		10.712.500	
3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12		10.712.500	
					Kertas HVS Folio		rim	5	76.700	383.500	
					Fotocopy / Penggandaan		lembar	3000	413	1.239.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Orang/hari	50	170.000	8.500.000	
					id card		Pcs	100	5.900	590.000	

3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	Persen	100,00		938.458.480	DAU / HIBAH / PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	desa/kelurahan	227		938.458.480	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	22		99.868.000	
					READSI						
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan		Kotak	50	30.000	1.500.000	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah; Jawa Barat		Kali	51	430.000	21.930.000	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah; Sulawesi Selatan		Kali	50	430.000	21.500.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I		OK	10	745.000	7.450.000	
					Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bisnis		OK	8	5.936.000	47.488.000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	22		838.590.480	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		528 Rim	528	76.700	40.497.600	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : tinta printer		88 btl	176	54.280	9.553.280	
					Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		252 Org/Bln	216	700.000	151.200.000	
					Penyuluh THL Kabupaten		745 Org/Bln	290	2.100.000	609.000.000	
					Belanja Tagihan Listrik		1.300 VA	7.000	1.381	9.667.000	
					Perjalanan Dinas dalam daerah		100 ok	100	170.000	17.000.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; BBM Pertamina			100	16.726	1.672.600	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program pelayanan administrasi perkantoran untuk tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 19.221.311.223,- yang digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pegawai yang bersifat administratif dan kebutuhan rutin kantor. Kegiatan yang masuk dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota antara lain :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, digunakan untuk membiayai penyusunan dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja OPD.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini menyangkut Penyediaan Gaji/Tunjangan ASN dan penyusunan Laporan Keuangan OPD.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, digunakan untuk penyediaan peralatan/perlengkapan kantor, bahan logistik, cetak/penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan biaya perjalanan dinas OPD dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, merupakan pembiayaan terkait penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan pembiayaan terkait pemeliharaan dan rehabilitasi barang asset milik pemerintah.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan program pembiayaan terkait penyediaan sarana pendukung pertanian seperti alat dan mesin pertanian (ALSINTAN). Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 11.467.205.465,-. Kegiatan yang akan dilaksanakan terkait program ini antara lain :
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, merupakan kegiatan penyediaan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian berupa alat dan mesin pertanian.

- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan terkait pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terkait budidaya dan penyediaan bibit tanaman.
 - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain, merupakan kegiatan penyediaan bibit ternak (sapi, kambing dan itik) bagi kelompok tani.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian merupakan program penyediaan prasarana pertanian, baik sarana pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian lainnya. Total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 11.839.093.940,-. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini antara lain :
- Pengembangan Prasarana Pertanian, sumber anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
 - Pembangunan Prasarana Pertanian, merupakan kegiatan pembangunan prasarana seperti Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung, Jalan Usaha Tani, Pintu air, dan prasarana pertanian lainnya. sumber anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi dan populasi ternak serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Luwu. Untuk tahun 2025, program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.712.500,-. Kegiatan yang menyangkut program ini adalah :

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten, merupakan kegiatan penyediaan obat-obatan hewan/ternak serta jasa petugas medis veteriner.
- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan terkait pelayanan kesehatan hewan jasa medis veteriner bagi masyarakat.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini merupakan program untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani serta penyediaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan pertanian. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 938.458.480,-. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, serta penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

BAB V.

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini kami buat, sebagai bahan pedoman atau acuan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025. Demi menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu akan melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga pembangunan Pertanian dapat lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri di masa yang akan datang.